

ABSTRAK

Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Selama bekerja para TKI merasa khawatir ditangkap pihak kepolisian, banyak yang tidak digaji oleh majikannya dan bila TKI mengalami musibah, sakit atau mendapat kecelakaan tidak memperoleh santunan asuransi, berbagai masalah lain muncul pula dalam urusan administratif yang sering dilanggar oleh para TKI, seperti kepemilikan paspor, prosedur kepemilikan visa, pemalsuan identitas diri seperti usia, nama orang tua/keluarga, dan alamat asal. Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri diatur dalam Undang-undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di negara asing menurut Undang Undang No.39 tahun 2004 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam proses perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara asing dari Undang-Undang No.39 tahun 2004 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti sebagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum atas hak-hak TKI dalam bekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal sudah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh TKI. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal berupaya mengadakan tes wawancara dalam perekrutan TKI serta berkoordinasi dengan pihak perusahaan penyalur jasa TKI

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga kerja Indonesia

ABSTRACT

Economic conditions unfavorable in its own country and substantial and seemingly more attractive revenues in destination countries have been the trigger for international labor mobility. During the work the migrants are worried about being arrested by police officers, the arise is in administrative matters which are often violated by migrant workers such as passport ownership, visa ownership procedures, falsification of identity such as age, parent / family name, and home address. The arrangement of Indonesian employment abroad is governed by Law No.39 of 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad. The legal protection of Indonesian Workers in foreign countries according to Law No.39 of 2004 in the Office of Manpower of Kendal Regency workers working in the country foreigners from Law No.39 of 2004 in Kendal District Manpower Office

The approach method used in this research is empirical juridical approach, which is a legal research method that serves to see the law in the real sense and examine as the work of law in the community. The location of the research was conducted at the Manpower Office of Kendal Regency, Central Java.

The results showed that the legal protection of the rights of labor migrants in working at the Manpower Office of Kendal Regency has been going well. The obstacle faced by Kendal Labor Office in the implementation of legal protection against TKI is that a mistake made by TKI. Kendal District Manpower Office seeks to conduct interviews in the recruitment of migrant workers and coordinate with the company supplier service workers

Keywords: Legal Protection, Indonesian Workers